

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seringkali, nama suatu suku langsung mengarah pada gambaran tentang orientasi hidup mereka, yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Misalnya, nama seperti Murut (orang bukit), Toraja (orang pedalaman), Subanun (orang bukit), Tidung (orang gunung), atau Maranao (orang danau) merujuk pada identitas mereka berdasarkan wilayah atau lingkungan yang mereka huni. Identitas semacam ini mirip dengan konsep "orang desa," "orang kota," atau "orang pantai." Namun, seringkali label-label ini memunculkan sikap superioritas, subordinasi, bahkan stereotip antar kelompok suku.

Ketika berbicara tentang orang yang hidup di laut, kita akan mengenal nama seperti "orang Laut," "orang Bajo," "orang Bajau," atau "orang Sama." Kelompok ini memiliki identitas yang kuat terkait dengan laut, yang sudah menjadi inti dari kehidupan mereka. Konon, nenek moyang orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia, dan menurut cerita rakyat, mereka diperintahkan oleh raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Pencarian ini membawa mereka hingga ke Pulau Sulawesi, dan sang putri akhirnya memilih untuk tinggal di sana. Orang-orang yang mencari kemudian memutuskan untuk menetap, dan dalam satu versi cerita, mereka memilih daerah yang kini dikenal sebagai Bajoe. Versi lain menyebutkan bahwa karena tidak dapat menemukan sang putri, mereka memilih tinggal di kawasan Teluk Tomini, yang meliputi Gorontalo dan Kepulauan Togian.

Meskipun belum ada penelitian pasti mengenai asal-usul orang Bajo, yang jelas adalah bahwa mereka membawa jejak perpindahan penduduk Asia Tenggara sekitar 2.000 tahun lalu. Nama Bajau dapat ditemukan di berbagai wilayah perairan Indonesia, seperti Selat Makassar, Teluk Bone, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur, hingga Kepulauan Sulu. Orang Bajo dikenal menjelajahi seluruh perairan Indonesia dan wilayah sekitarnya, meskipun kini lebih banyak dikenal di bagian timur, Sabah, dan Kepulauan Sulu.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan panjang pantai sekitar 81.900 km, berbatasan dengan sepuluh negara baik melalui darat maupun laut. Wilayah lautnya, yang mencakup 92 pulau terluar, sering menghadapi berbagai masalah dengan negara tetangga, seperti perompakan dan perdagangan manusia. Menurut Kazufumi (2017), sekitar 1.100.000 orang Bajo tinggal di sepanjang pantai dan pulau-pulau Indonesia, dengan jaringan sosial dan ekonomi yang luas di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian mengenai sosial budaya orang Bajo di Indonesia telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti lokal maupun internasional, dengan fokus pada sejarah, asal-usul, pengembaraan, pencarian hasil laut, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan setempat (Touchmann, 1994; Liebner, 2005; Lampe, 2017). Namun, penelitian lebih lanjut tentang diversifikasi mata pencaharian nelayan Bajo perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di kalangan nelayan, terdapat tiga kelas sosial yang hidup berdampingan

namun memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu buruh (sawi), pemilih perahu (punggawa), dan pemilik modal (kapitalis). Fenomena ini dipengaruhi oleh pengetahuan, perasaan, dan sikap yang berkembang lama dalam masyarakat dan mempengaruhi cara mereka merespons realitas sosial (Arsat dkk., 2023). Nelayan Bajo, khususnya di Kabupaten Banggai Laut, seringkali menghadapi pendapatan yang tidak menentu dan hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Para nelayan Bajo di Matanga telah melaut dan menangkap ikan sebagai pekerjaan yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi sumber daya alam di wilayah ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi mereka untuk menunjang kehidupan keluarga. Namun, pekerjaan sebagai nelayan sangat tergantung pada kondisi cuaca. Ketika cuaca bersahabat, mereka dapat dengan mudah pergi melaut, tetapi jika cuaca memburuk, kegiatan menangkap ikan menjadi sulit bahkan tidak mungkin dilakukan.

Ketergantungan nelayan pada kondisi cuaca ini berdampak pada ketidakmampuan mereka mencari nafkah ketika cuaca buruk. Situasi ini bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan hingga kelaparan bagi para nelayan dan keluarga mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi usaha. Diversifikasi diharapkan dapat memberikan tambahan sumber pendapatan bagi nelayan Bajo di Matanga, memungkinkan mereka untuk memperoleh penghasilan lain saat tidak dapat melaut. Dengan adanya diversifikasi, mereka memiliki peluang untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai Diversifikasi Mata Pencaharian Nelayan Bajo di Matanga, Kabupaten Banggai, perlu dilakukan.

1.2. Studi Tentang Suku Bajo

Orang Laut, Bajo, Bajau, atau Sama Bajo adalah kelompok suku yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, terutama di sekitar perairan karang. Nama "Bajo" diberikan oleh masyarakat luar, sementara mereka sendiri menyebut diri mereka sebagai "Sama" dan menyebut orang di luar mereka sebagai "Bagai" (orang darat). Dalam bahasa Bajo, istilah "sama" digunakan untuk merujuk pada sesama mereka dan membedakan diri dari "bagai", yang berarti orang luar. Istilah ini menciptakan rasa kebersamaan di antara mereka sebagai satu kelompok masyarakat yang terikat erat (Tahara, 2017).

Meskipun orang Bajo sering disamakan dengan orang Bugis, baik dalam sejarah maupun penelitian, mereka adalah kelompok yang berbeda. Sejak abad ke-16, orang Bajo sudah dikenal sebagai pelaut yang aktif, bukan hanya pengembara laut. Mereka juga terlibat dalam perdagangan internasional, memasok berbagai komoditas laut seperti kerang mutiara, teripang, dan rumput laut. Selain itu, mereka juga menyediakan produk dari hutan bakau, seperti kayu, akar, damar, dan madu, melalui hubungan dagang dengan Kerajaan Bugis dan Makassar (Andaya, 1984:36).

Orang Bajau dikenal sebagai pelaut ulung dan pewaris kebudayaan maritim, meskipun sejarah lebih mengakui suku Makassar, Bugis, Buton, atau Mandar sebagai raja laut. Orang Bajau, yang melarikan diri ke laut untuk menghindari

perang dan kericuhan, kini hidup sepenuhnya di atas air dengan jaringan yang luas di Asia Tenggara.

Selama ini, orang Bajau sering dikaitkan dengan kerusakan ekosistem terumbu karang dan penurunan populasi biota laut, terutama karena praktik destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan bahan kimia beracun. Oleh karena itu, program konservasi di negara-negara berkembang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, termasuk keterlibatan orang Bajau (Clifton & Majors, 2011).

Namun, pertanyaan muncul apakah praktik destruktif tersebut memang sudah menjadi bagian dari tradisi orang Bajau atau muncul karena pengaruh sosial-ekonomi dan politik eksternal. Mengingat kurangnya penelitian ekologi manusia yang valid, sulit untuk memberikan jawaban pasti. Namun, di beberapa wilayah pesisir yang dihuni orang Bajo, seperti Kawasan Takabonerate, Wakatobi, dan Togian, terdapat cerita rakyat yang menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya laut secara seimbang, dengan mempertahankan tatanan sosial dan kepercayaan yang kuat.

Keberadaan Suku Bajau sebagai komunitas maritim masih kurang terekspos oleh para sejarawan, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan kelompok etnik lain. Padahal, interaksi antara orang Bajo dan masyarakat maritim sangat menarik untuk dikaji. Misalnya, di Pulau Buton dan sekitarnya, seperti Tiworo dan Kepulauan Tukang Besi (sekarang Wakatobi), banyak ditemui komunitas Suku Bajau (Sama) yang sangat terkait dengan laut. Kedekatan antara orang Buton dan Bajo tercermin dalam nama Pasar Wajo, yang menjadi tempat interaksi antara kedua kelompok tersebut, dengan "Wajo" merujuk pada orang Bajo dalam bahasa masyarakat Buton (Zuhdi, 2010).

Meskipun orang Bajo merasa lebih unggul dalam budaya maritim dibandingkan dengan orang yang tinggal di darat, mereka juga merasa inferior ketika berinteraksi dengan masyarakat daratan, yang dianggap memiliki peradaban lebih maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengarah pada munculnya stereotip bahwa orang Bajo dianggap sebagai masyarakat yang terasing, terbelakang, dan tertutup.

Nama "Bajo" sering kali dijadikan label atau stereotip yang mengaitkan kelompok ini dengan perompak atau bajak laut. Di beberapa daerah yang berdekatan dengan pemukiman orang Bajo, berkembang cerita bahwa perompak zaman dahulu diyakini berasal dari orang Sama. Sejak saat itu, banyak orang menyebut kelompok Sama sebagai orang Bajo, yang dianggap sebagai kelompok perompak. Karena orang Bajo dikenal sebagai masyarakat maritim yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di kawasan timur, stereotip ini melekat pada mereka sebagai suku perampok. Namun, stereotip ini memicu perlawanan dari masyarakat Bajo yang membantah label tersebut.

Untuk mengatasi stigma itu dan memperbaiki posisi mereka, orang Bajo membentuk organisasi Kerukunan Keluarga Bajo (Kekar Bajo) yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bahkan menjalin hubungan dengan orang Bajo di Malaysia, Thailand, dan Filipina melalui organisasi yang disebut The Bajau

International Communities Confederation (BICC). Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan orang Bajo, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pelestarian budaya.

Ada beberapa versi mengenai asal-usul orang Bajo; salah satunya mengaitkan mereka dengan Johor, Malaysia, yang terdampar di Sulawesi Selatan, sementara versi lainnya menyebutkan mereka berasal dari Palopo, Sulawesi.

Orang Bajo kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, Flores, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Gorontalo. Meskipun demikian, banyak yang meyakini bahwa asal-usul mereka berasal dari Johor. Kesadaran akan identitas mereka sebagai suku yang bukan milik satu negara, melainkan suku dunia, telah diakui di tingkat internasional melalui UNESCO dan PBB. BICC berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan pelestarian budaya orang Bajo, termasuk memberikan beasiswa bagi generasi muda mereka.

BICC dipimpin oleh Datuk Sri Saleh Keruak, seorang anggota Parlemen Sabah yang juga berasal dari suku Bajo. Dibandingkan dengan negara-negara lain, orang Bajo di Indonesia masih tertinggal. Meskipun orang Bajo di Malaysia juga berprofesi sebagai nelayan, mereka sudah tidak lagi tergolong nelayan tradisional karena telah berkembang pesat. Bahkan, di Phuket, Thailand, yang merupakan salah satu destinasi wisata terkenal, bisnis orang Bajo turut berkembang. Melihat kondisi ini, Presiden Bajo Indonesia memiliki tekad kuat untuk memajukan komunitas Bajo di Indonesia agar setara dengan orang Bajo di negara-negara lain.

Masyarakat Bajo, salah satu kelompok etnis yang terkenal dengan tradisi kelautannya, dapat ditemukan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki keahlian dalam navigasi laut, penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya laut. Masyarakat Bajo memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial-ekonomi, masyarakat Bajo mulai melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Diversifikasi usaha ini mencakup berbagai sektor, baik yang masih berkaitan dengan pekerjaan tradisional mereka sebagai nelayan maupun usaha-usaha yang mengarah pada sektor non-perikanan, seperti pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Penelitian mengenai diversifikasi usaha yang dilakukan oleh masyarakat Bajo di Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan diversifikasi usaha.

Diversifikasi usaha di kalangan masyarakat Bajo dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, perubahan sosial-ekonomi, hingga adaptasi terhadap teknologi dan pasar global. Beberapa sektor yang menjadi fokus dalam diversifikasi usaha ini antara lain pariwisata, pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

Masyarakat Bajo tetap mempertahankan tradisi mereka sebagai nelayan, namun banyak yang mulai mengembangkan usaha sampingan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Misalnya, mereka tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga memanfaatkan hasil laut lainnya, seperti rumput laut, kerang, dan ikan asin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Bajo, terutama yang tinggal di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, mulai mengembangkan budidaya rumput laut sebagai usaha tambahan (Baharuddin & Lestari, 2020). Rumput laut kini menjadi salah satu komoditas ekspor yang penting, yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat Bajo.

Selain itu, sektor perikanan di beberapa wilayah seperti Wakatobi (Sulawesi Tenggara) juga mulai berkembang ke arah pengolahan produk perikanan. Masyarakat Bajo mulai terlibat dalam industri pengolahan ikan, seperti pembuatan abon ikan, ikan asin, dan produk olahan laut lainnya, yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat tetapi juga dipasarkan ke daerah lain (Sulaeman et al., 2019). Ini adalah bentuk diversifikasi usaha dalam sektor perikanan yang memanfaatkan sumber daya alam laut secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mulai menarik perhatian masyarakat Bajo dalam upaya diversifikasi usaha mereka. Dengan adanya potensi alam yang melimpah, terutama keindahan bawah laut, beberapa daerah yang dihuni oleh masyarakat Bajo, seperti Wakatobi dan Labuan Bajo, mulai mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan wisata bahari. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Bajo telah mulai berperan aktif dalam mengelola destinasi wisata, seperti menjadi pemandu wisata atau mengelola homestay untuk para turis yang mengunjungi daerah mereka.

Di Wakatobi, misalnya, masyarakat Bajo yang tinggal di sekitar taman laut Wakatobi banyak yang beralih ke sektor pariwisata. Mereka mengelola kapal tradisional untuk wisatawan yang ingin menyelam atau menikmati keindahan alam laut. Menurut penelitian oleh Wijayanti (2018), masyarakat Bajo di Wakatobi kini juga terlibat dalam kegiatan ekowisata dengan menjadi pemandu wisata selam, pengelola homestay, dan penyedia layanan wisata lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan alternatif pendapatan tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan laut.

Selain itu, di Labuan Bajo, yang terkenal dengan destinasi wisata "Komodo", masyarakat Bajo juga terlibat dalam industri pariwisata, baik sebagai pemandu wisata maupun dalam sektor jasa lainnya, seperti transportasi laut dan kuliner. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, masyarakat Bajo mulai merasakan manfaat ekonomi dari pariwisata yang dikelola secara lebih profesional (Jaya et al., 2020).

Selain sektor perikanan dan pariwisata, sebagian masyarakat Bajo di beberapa daerah juga mulai terlibat dalam sektor pertanian sebagai bentuk diversifikasi usaha. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, masyarakat Bajo mulai beralih ke pertanian hortikultura, seperti budidaya kelapa, pisang, dan tanaman-tanaman lainnya. Meskipun tradisionalnya mereka lebih bergantung pada laut, faktor terbatasnya sumber daya laut yang dapat ditangkap

serta perubahan iklim yang memengaruhi hasil perikanan mendorong mereka untuk mencoba bertani.

Di daerah pesisir, sebagian besar keluarga Bajo memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah mereka untuk menanam tanaman pangan yang dapat dikonsumsi sehari-hari, seperti jagung, ubi, atau sayuran. Diversifikasi ini tidak hanya membantu ketahanan pangan keluarga, tetapi juga memberikan alternatif pendapatan ketika hasil laut sedang menurun (Irawan et al., 2021).

Industri rumah tangga dan kerajinan juga menjadi bentuk diversifikasi usaha yang mulai berkembang di kalangan masyarakat Bajo. Produk-produk kerajinan tangan seperti anyaman dari rotan dan bambu, pembuatan perhiasan dari kerang, serta produk tekstil tradisional semakin banyak dihasilkan oleh masyarakat Bajo di beberapa daerah pesisir, terutama di Sulawesi dan Maluku. Usaha ini terutama dilakukan oleh perempuan Bajo, yang telah lama terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga (Sari et al., 2019).

Peningkatan keterampilan kerajinan tangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian keluarga, tetapi juga sebagai produk unggulan yang dapat dipasarkan, baik di pasar lokal maupun internasional. Di beberapa daerah, kelompok-kelompok pengrajin Bajo bahkan telah membentuk koperasi untuk memasarkan hasil kerajinan mereka secara lebih terorganisir (Rahman et al., 2020).

Diversifikasi usaha yang dilakukan oleh masyarakat Bajo dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan diversifikasi usaha:

1) *Faktor Ekonomi*

Keterbatasan pendapatan dari sektor perikanan, terutama di musim-musim tertentu ketika hasil laut menurun, mendorong masyarakat Bajo untuk mencari sumber pendapatan lain. Selain itu, harga hasil perikanan yang tidak stabil juga menjadi faktor pendorong diversifikasi usaha.

2) *Faktor Lingkungan*

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan laut akibat overfishing atau polusi juga memengaruhi pola hidup masyarakat Bajo. Dengan berkurangnya hasil laut, mereka mulai mencari alternatif mata pencaharian di luar sektor perikanan.

3) *Faktor Sosial dan Budaya*

Masyarakat Bajo, yang secara tradisional sangat bergantung pada adat dan kebiasaan mereka, juga mulai mengubah pola pikir untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan dan peningkatan keterampilan di luar sektor perikanan memainkan peran penting dalam diversifikasi usaha ini.

Masyarakat Bajo telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan perubahan zaman melalui diversifikasi usaha. Meskipun tradisi sebagai nelayan tetap dipertahankan, mereka mulai mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata, pertanian, dan kerajinan, untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi. Keberhasilan diversifikasi usaha ini sangat bergantung pada faktor-faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan dan akses pasar bagi masyarakat Bajo

perlu didorong, agar mereka dapat terus berkembang dan berdaya saing di era globalisasi ini.

1.3. Masyarakat Nelayan

Masyarakat maritim adalah kelompok-kelompok manusia yang saling berinteraksi dan bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan ekonomi mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kebudayaan maritim sebagai ciri khasnya (Lampe, dkk., 2000). Ada dua tipe sosial-ekonomi dalam masyarakat maritim: (1) tipe pedesaan tradisional yang berkembang, dengan struktur sosial yang egaliter dan kurang berkelas, serta hubungan sosial yang akrab dan saling membantu, dan (2) tipe modern perkotaan yang kapitalis dan industrial. Pada tipe pertama, pembagian kerja lebih santai, dengan aturan bagi hasil yang menekankan pemerataan.

Masyarakat maritim tipe kedua memiliki struktur sosial yang berstrata, dengan perbedaan status dan peran yang jelas dalam organisasi sosial dan hubungan yang lebih formal. Pada kelompok kerja seperti nelayan atau pelayar, aturan pengupahan diterapkan dengan pembagian pendapatan berdasarkan status. Meskipun begitu, masyarakat nelayan modern masih mempertahankan semangat kolektivitas dan egalitarian.

Dalam kajian antropologi dan sosiologi, masyarakat nelayan sering dipahami sebagai kelompok dengan struktur sosial yang khas, yang erat kaitannya dengan sumber daya alam dan pola interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitar. Kehidupan mereka sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti cuaca, musim, serta keadaan laut. Hal ini mengarah pada dinamika sosial yang memiliki keterkaitan kuat dengan alam, nilai-nilai lokal, dan tradisi turun-temurun (Berkes, 2018).

Beberapa teori penting yang digunakan untuk memahami masyarakat nelayan antara lain teori ekonomi, ekologi, dan teori struktur sosial.

1.3.1. Teori Ekonomi

Menurut teori ini, masyarakat nelayan merupakan bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas, di mana penghidupan mereka bergantung pada penangkapan dan perdagangan ikan. Pada masyarakat nelayan tradisional, penangkapan ikan lebih bersifat subsisten, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, pada masyarakat nelayan yang lebih modern, perikanan telah menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan baik secara domestik maupun internasional. Dalam hal ini, sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi negara, terutama di daerah pesisir yang mengandalkan perikanan sebagai mata pencaharian utama (Rosenberg et al., 2019).

1.3.2. Teori Ekologi

Dari perspektif ekologi, masyarakat nelayan sering dipandang sebagai kelompok yang memiliki hubungan simbiotik dengan lingkungan laut. Mereka bergantung pada sumber daya laut, namun dalam beberapa kasus juga melakukan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut. Pemahaman

ekologi dalam masyarakat nelayan menekankan pentingnya pengelolaan berbasis lingkungan dan berkelanjutan (Smith et al., 2017). Hal ini relevan dalam konteks masyarakat nelayan Indonesia, di mana kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan bisa berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi mereka.

1.3.3. Teori Struktur Sosial

Menurut teori ini, masyarakat nelayan memiliki sistem sosial yang sangat terstruktur, dengan hierarki yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam masyarakat nelayan tradisional, ada pembagian kerja antara nelayan yang melakukan penangkapan ikan dan wanita yang mengolah hasil tangkapan atau menjalankan peran lainnya dalam komunitas. Hubungan sosial ini sering kali terjalin dengan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Yunus, 2020).

1.3.4. Kondisi Masyarakat Nelayan di Berbagai Daerah di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki banyak komunitas nelayan di berbagai daerah. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis, yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Di Aceh, masyarakat nelayan umumnya tergolong dalam kelompok nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, seperti jaring dan pancing. Dalam beberapa penelitian, misalnya oleh Rahman et al. (2021), ditemukan bahwa meskipun nelayan di Aceh sangat bergantung pada hasil laut, mereka sering menghadapi tantangan terkait akses ke pasar yang jauh dan minimnya infrastruktur pendukung. Namun, mereka juga memiliki sistem sosial yang sangat solidaritas tinggi dan bergantung pada hubungan kekerabatan dalam menjalankan kegiatan nelayan.

Berbeda dengan Aceh, masyarakat nelayan di Bali sebagian besar telah beralih ke teknologi yang lebih modern, seperti penggunaan kapal motor dan alat tangkap yang lebih efisien. Studi oleh Suardana et al. (2018) mengungkapkan bahwa di Bali, masyarakat nelayan memiliki kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan nelayan di daerah lain, berkat adanya sektor pariwisata yang mendukung mereka. Banyak nelayan yang juga terlibat dalam kegiatan ekowisata, seperti wisata memancing dan tur perikanan, yang memanfaatkan keindahan alam laut Bali.

Masyarakat nelayan di Sulawesi memiliki variasi yang cukup besar, tergantung pada daerahnya. Di Sulawesi Selatan, misalnya, nelayan sebagian besar menggunakan jaring dan alat tangkap tradisional, meskipun teknologi modern mulai berkembang di beberapa daerah pesisir. Menurut kajian oleh Prasetyo et al. (2019), nelayan di Sulawesi sering menghadapi masalah dalam hal keberlanjutan sumber daya ikan karena eksploitasi yang berlebihan, serta dampak dari perubahan iklim yang mengganggu pola tangkapan mereka.

Di Sulawesi Selatan, dikenal sistem kerja sama nelayan *pong-gawa-sawi*, yang sudah ada sejak lama. *Pong-gawa* adalah pemimpin sekaligus pemilik usaha perikanan, sedangkan *sawi* adalah anak buah atau pengikut. Terdapat dua jenis *pong-gawa*: *pong-gawa* laut (pemimpin pelayaran) dan *pong-gawa* darat (pemilik dan pengelola usaha). *Pong-gawa* juga bisa berarti pedagang atau rentenir yang memberi pinjaman kepada nelayan. Sistem rekrutmen *sawi* umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan, dan keterampilan mereka dipelajari melalui pewarisan atau pengalaman langsung.

Dulu, seorang *pong-gawa* biasanya hanya memiliki satu perahu dan peralatan tangkap sederhana. Perahu dan alat tangkap tersebut sering dibuat oleh *pong-gawa* sendiri atau oleh tukang lokal yang juga merupakan nelayan. Kepemilikan dan penguasaan alat produksi saat itu relatif mudah bagi *pong-gawa* karena bahan-bahan material mudah didapat dan pengelolaan yang sederhana memungkinkan *pong-gawa* untuk turut aktif bekerja bersama *sawinya* di laut.

Seiring dengan berkembangnya usaha perikanan, jumlah perahu dan alat produksi meningkat, sehingga lebih banyak *sawi* yang terlibat. Hal ini menyebabkan pembagian tugas yang lebih jelas dan rumit. Maka, muncul status *pong-gawa* darat atau *pong-gawa lompo* yang berfungsi mengelola usaha, menyediakan alat produksi, membimbing kelompok nelayan, dan mengurus pemasaran hasil tangkapan. Dalam perkembangan ini, *pong-gawa* laut atau juragan lebih berfungsi sebagai pemimpin atau pengawas pelayaran, bukan lagi sebagai pemilik. Mereka disebut *pong-gawa caddi* atau pemimpin kecil.

Seiring bertambahnya unit usaha, *pong-gawa lompo* dapat merekrut *pong-gawa caddi* untuk memimpin kelompok *sawi* dalam usaha perikanan tertentu. *Pong-gawa caddi* berasal dari keluarga *pong-gawa lompo*, sementara *sawi* direkrut dari kerabat atau warga desa. Dalam struktur ini, *pong-gawa caddi* bertindak sebagai wakil *pong-gawa lompo*, meski lebih dekat dengan *sawi* yang bekerja di laut. Hubungan antara anggota kelompok membentuk hubungan *pong-gawa-sawi* yang rumit, mirip dengan hubungan *patron-client*, bukan hanya berdasarkan kontrak kerja, pembagian tugas, dan aturan hasil, tetapi juga nilai-nilai keluarga. Banyak kapal yang dimiliki dan diawaki oleh keluarga/kerabat, mencerminkan hubungan kerjasama yang erat. Melalui sosialisasi orang tua, *sawi* dan juragan memperoleh keterampilan teknis serta nilai-nilai tanggung jawab, seperti usaha, loyalitas, dan kekompakan.

Dulu, seorang *pong-gawa* hanya memiliki satu perahu dan peralatan tangkap sederhana. Perahu dan alat tangkap tersebut sering dibuat oleh *pong-gawa* sendiri atau oleh tukang lokal yang juga merupakan nelayan. Kepemilikan dan penguasaan alat produksi saat itu relatif mudah bagi *pong-gawa* karena bahan-bahan material mudah didapat dan pengelolaan yang sederhana memungkinkan *pong-gawa* untuk turut aktif bekerja bersama *sawinya* di laut.

Seiring dengan berkembangnya usaha perikanan, jumlah perahu dan alat produksi meningkat, sehingga lebih banyak *sawi* yang terlibat. Hal ini menyebabkan pembagian tugas yang lebih jelas dan rumit. Maka, muncul status *pong-gawa* darat atau *pong-gawa lompo* yang berfungsi mengelola usaha, menyediakan alat

produksi, membimbing kelompok nelayan, dan mengurus pemasaran hasil tangkapan. Dalam perkembangan ini, *pongawa* laut atau juragan lebih berfungsi sebagai pemimpin atau pengawas pelayaran, bukan lagi sebagai pemilik. Mereka disebut *pongawa caddi* atau pemimpin kecil.

Dengan semakin banyaknya unit usaha, seorang *pongawa* lombo bisa merekrut beberapa *pongawa caddi* yang memimpin kelompok sawi untuk usaha perikanan tertentu. Karena anggota keluarga *pongawa* lombo tidak lagi mencukupi, sawi direkrut dari kerabat atau orang desa, sementara *pongawa caddi* tetap berasal dari keluarga *pongawa lombo*. Dalam struktur ini, *pongawa caddi* bertindak sebagai wakil *pongawa lombo*, meskipun mereka lebih dekat dengan sawi yang bekerja di laut.

Di Jawa Timur, khususnya di daerah pesisir seperti Probolinggo dan Situbondo, masyarakat nelayan sudah mulai mengadopsi teknologi penangkapan ikan yang lebih maju. Penelitian oleh Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa nelayan di daerah ini banyak yang bergantung pada perikanan komersial, seperti ikan tuna dan ikan cakalang, yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Masyarakat nelayan di Jawa Timur juga lebih terorganisir dalam koperasi perikanan, yang memungkinkan mereka untuk mengakses pasar lebih luas dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Di Papua, masyarakat nelayan lebih sering tergolong dalam kelompok nelayan tradisional dengan penggunaan alat tangkap sederhana. Studi oleh Wirawan (2021) menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Papua masih sangat terikat pada pola subsisten, meskipun potensi perikanan yang melimpah di wilayah ini. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Papua adalah keterbatasan akses ke teknologi modern, serta minimnya dukungan dari pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Masyarakat nelayan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tantangan utama meliputi masalah terkait eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan lingkungan laut, serta keterbatasan infrastruktur dan akses ke pasar. Selain itu, dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem, juga menjadi masalah yang semakin nyata bagi mereka.

Namun, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan, seperti pengembangan ekowisata, pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan, dan pembentukan koperasi nelayan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, dengan adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, masyarakat nelayan Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perikanan dengan lebih optimal.

1.4. Sumber Daya Laut dan Sistem Mata Pencaharian

Sumber daya pesisir dan lautan tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan pesisir, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian mereka. Untuk memaksimalkan potensi ini,

masyarakat nelayan perlu mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan tantangan alam dan menguasai teknologi yang efisien untuk mengeksploitasi biota laut bernilai tinggi. Di banyak wilayah pesisir, komunitas nelayan dan pelayar dengan budaya khas ini membentuk komunitas maritim, yang karakteristiknya tercermin dalam model pengelolaan mata pencaharian yang fokus pada sektor perikanan laut. Mereka juga memiliki sistem pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut.

Nelayan yang terlibat dalam usaha perikanan laut bekerja secara spesialis dan profesional. Faktor modal dan hubungan kerja sama adalah kunci dalam menentukan kelangsungan atau perkembangan usaha perikanan, baik yang berskala besar dan modern maupun kecil dan tradisional. Pekerjaan menangkap ikan di laut mengandung risiko besar terhadap keselamatan jiwa dan ketidakpastian pendapatan, menjadikan risiko dan ketidakpastian sebagai karakteristik kehidupan nelayan. Kondisi laut yang berbahaya ini menuntut pengelolaan modal yang berkelanjutan dan mantap, sementara teknologi perikanan yang kompleks dan kondisi alam yang menantang mengharuskan adanya kerja sama yang solid, bukan hanya berdasarkan kekuatan fisik, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai solidaritas, moral, dan tanggung jawab antar anggota tim.

Selama ini, sistem bagi hasil sudah lama diterapkan dalam ekonomi perikanan laut, menggantikan sistem upah atau gaji (Acheson, 1981). Dalam sistem ini, hasil tangkapan ikan dibagi, jadi besar kecilnya bagian tiap orang tergantung pada jumlah ikan yang didapat. Biasanya, komponen alat produksi, seperti tenaga kerja, mendapat bagian lebih besar dibandingkan nelayan biasa. Pada akhirnya, bagian dari alat produksi ini akan jatuh ke tangan pemiliknya.

Di kalangan nelayan Bugis-Makassar, mereka sering bekerja sama dengan teman, kerabat, atau bahkan pedagang besar di kota untuk mendapatkan pinjaman modal, baik untuk memulai usaha atau untuk jangka panjang. Modal tersebut bisa berupa uang, kapal, mesin, atau alat tangkap. Biasanya, pembayaran pinjaman dilakukan dengan menjual hasil tangkapan ikan secara terus-menerus kepada pemberi pinjaman.

Di Sulawesi Selatan, ada pola hubungan kerja yang disebut sistem "*pongawa-sawi*", yang mirip dengan hubungan antara majikan dan pelanggan. Dalam sistem ini, pihak yang paling kaya berfungsi sebagai *pongawa* (bos), dan pihak yang kurang mampu berfungsi sebagai *sawi* (anak buah). Meskipun ketidaksetaraan dalam pembagian hasil sering dianggap sebagai penyebab kemiskinan nelayan sawi, sistem ini juga menjadi tumpuan bagi mereka, terutama selama masa sulit, karena *pongawa* sering menjadi tempat mencari pinjaman.

Dari perspektif kekuasaan, hubungan kerja *pongawa-sawi* menunjukkan dinamika struktural dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi perilaku nelayan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam lembaga ini mencerminkan pergerakan kekuasaan yang terus berlangsung, sehingga terjadi reproduksi struktural. Posisi struktural dalam organisasi ini bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan definisi yang ada, sebagaimana dikemukakan oleh Bourdieu

(1977). Proses pengambilan keputusan ini memainkan peran penting dalam pemanfaatan sumber daya laut oleh nelayan dalam sistem *ponggawa-sawi*.

Seperti halnya masyarakat nelayan di Minahasa, *Biso* dan rekan-rekan (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nelayan di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, melakukan diversifikasi pekerjaan, dengan bekerja sebagai buruh bangunan, tukang kayu, petani, dan peternak, sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga.

1.5. Masalah Penelitian

Selama ini, tema-tema penelitian Suku Bajo sebagai pendukung kebudayaan maritim cenderung ditekankan pada masalah-masalah kelembagaan nelayan. kemiskinan penduduk nelayan pesisir dan pulau-pulau, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterampilan, kurang memadainya teknologi perikanan, hak ulayat laut, konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya laut, dan merosotnya stok sumber daya perikanan akibat eksploitasi yang destruktif oleh nelayan dan kapitalistik/tekanan pasar.

Sebagai bentuk strategi mempertahankan hidup nelayan Bajo di Matanga Kabupaten Banggai Laut mengembangkan keanekaragaman mata pencaharian sebagai strategi dalam bertahan hidup.

Masalah penelitian ini, akan dibagi dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa jenis-jenis diversifikasi mata pencaharian nelayan Bajo di Desa Matanga Kabupaten Banggai Laut?
2. Apa yang melatari sehingga nelayan Bajo di Desa Matanga Kabupaten Banggai Laut memilih diversifikasi mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari?

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebudayaan orang Bajo di Kabupaten Banggai Laut berkenaan dengan sistem mata pencaharian. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk diversifikasi mata pencaharian nelayan Bajo di Kabupaten Banggai Laut.
- 2) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk latar belakang munculnya diversifikasi mata pencaharian nelayan Bajo di Kabupaten Banggai Laut.

1.6.2. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan kemajuan masyarakat, di antaranya:

- Secara akademis, penelitian memungkinkan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah kondusifitas masyarakat dengan lebih dalam tentang kebudayaan nelayan Bajo di Kabupaten Banggai Laut.
- Secara praktis, penelitian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti, di mana penelitian menyediakan bukti-bukti yang dapat

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang, termasuk di bidang antropologi maritim.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, berupa pendeskripsian kebudayaan nelayan Bajo di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah berkenaan dengan sistem mata pencahariannya.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai salah satu lokasi pemukiman orang Bajo di Kabupaten Banggai Laut. Secara metodologi alasan memilih lokasi penelitian ini karena aktivitas orang Bajo di Kabupaten Banggai Laut berkenaan dengan aktivitasnya dalam memanfaatkan sumber daya laut. Penelitian dilakukan pada 10 Juli-10 Oktober 2024.

2.3. Informan Penelitian

Sejumlah informan pada penelitian terdiri dari sejumlah nelayan Bajo yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut dan menerapkan diversifikasi mata pencaharian. Informan tersebut adalah nelayan, istri nelayan, punggawa (pemodal), aparat pemerintah yang bertugas di lokasi penelitian. Informan yang digunakan sebanyak 9 orang.

Tabel 1. Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	DH	54	Nelayan/Petani
2.	IR	45	Nelayan/Petani
3.	HL	60	Nelayan/Petani
4.	IS	47	Nelayan/Petani
5.	SR	36	Nelayan/Petani
6.	RH	65	Juragan/pemodal
7.	AG	41	IRT/Istri nelayan
8.	MJ	45	IRT/istri nelayan
9.	ST	38	Aparat desa

Sumber: Data Primer, 2024

2.4. Sumber Data

Sebagai sumber data penelitian meliputi data primer, sebagai data yang didapatkan dari objek penelitian. Data lainnya adalah data sekunder berupa jurnal, dokumen dan sumber lain.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan melalui keterlibatan langsung di seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan berpartisipasi (*participant observation*), seperti aktivitas melaut dan melakukan pekerjaan lain selain menangkap ikan di lokasi penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan aktifitas melalui kamera dan foto dan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menyusun pedoman wawancara. Tema-tema wawancara seperti

bentuk-bentuk atau aktifitas yang dilakukan dalam memanfaatkan sumberdaya laut atau menangkap ikan, aspek kelembagaan sebagai bentuk organisasi nelayan dan lain-lain. Merekam wawancara untuk kemudian ditranskrip dan dianalisis. Catatan lapangan, atau *field note*, adalah bentuk laporan yang dibuat selama berada di lapangan, meliputi coretan, pemikiran, serta pengalaman yang diperoleh selama proses penelitian.

2.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu merapikan data-data penelitian baik yang berupa transkrip wawancara, dokumentasi foto atau video, dan catatan-catatan kecil dari hasil observasi di lapangan; Setelah itu peneliti melakukan *coding data* secara keseluruhan terhadap data dasar yang telah diperoleh di lapangan; Selanjutnya, peneliti menganalisis data dari hasil *coding data*. Hasil analisis kemudian dibuatkan tema berdasarkan pertanyaan penelitian yang hendak di jawab; Terakhir, penulisan laporan secara deskriptif naratif, dan holistik.

2.7. Etika Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengurus izin secara formal dari kampus kepada Pemda Banggai Laut, Sulawesi Tengah, serta kepada informan penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu menyampaikan izin wawancara dan perekaman. Pada penelitian ini seluruh informan menyatakan bersedia direkam dengan menggunakan aplikasi rekam di *handphone*. Kami juga sampaikan bahwa informasi yang bersifat rahasia atau *off the record* tidak akan ditulis dalam penelitian ini. Dalam hal ini seluruh informan menyatakan tidak keberatan atau bersedia untuk terlibat sebagai informan dalam penelitian ini, termasuk pengungkapan identitas mereka berupa inisial nama, umur dan pekerjaan.